



Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Tata Kelola BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Endang Komara¹, Agus Mulyanto², Popi Siti Ichsanniaty³, Wahyu Purnama⁴, Muhammad Sanny⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia

E-mail: poppyichsanniaty@gmail.com, inisial.wp@gmail.com, yusufsanny.ys@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-03-12 Revised: 2023-04-10 Published: 2023-05-04	The background of this research is that some school principals do not understand the management of educational unit operational assistance in accordance with educational report cards. This has an impact on expenditure objects issued that do not refer to educational planning. So there is no suitability of the educational program with the resulting output. The method used in this research is descriptive qualitative analysis, while the data collection technique is done through interviews and observation. From the results of the study it was concluded that leaders have a role as active, creative subjects in moving people both as individuals and groups/organizations in achieving goals/visions, effectively. The principal's leadership has a strategic role within the management framework and the principal is one of the most important factors in supporting the success of the school in achieving the set school goals. The school principal is the manager of the education unit whose job is to collect, utilize, optimize all potential and human resources, environmental resources (facilities and infrastructure) and existing sources of funds to foster the school and school community it manages.
Keywords: <i>Leadership;</i> <i>Principal;</i> <i>Governance;</i> <i>Education Unit</i> <i>Operational Assistance.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-03-12 Direvisi: 2023-04-10 Dipublikasi: 2023-05-04	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebagian Kepala Sekolah belum memahami tentang tata kelola bantuan operasional satuan pendidikan yang sesuai dengan rapor pendidikan. Hal ini berdampak pada objek belanja yang dikeluarkan tidak mengacu pada perencanaan pendidikan. Sehingga tidak adanya kesesuaian program pendidikan dengan keluaran yang dihasilkan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan observasi. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pemimpin mempunyai peranan sebagai subyek yang aktif, kreatif dalam menggerakkan orang baik sebagai individu maupun kelompok/organisasi dalam pencapaian tujuan/visi, secara efektif. Kepemimpinan kepala sekolah memiliki peran strategis dalam kerangka manajemen dan kepala sekolah merupakan salah satu faktor terpenting dalam menunjang keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Kepala sekolah adalah pengelola satuan pendidikan yang bertugas menghimpun, memanfaatkan, mengoptimalkan seluruh potensi dan SDM, sumber daya lingkungan (sarana dan prasarana) serta sumber dana yang ada untuk membina sekolah dan masyarakat sekolah yang dikelolanya.
Kata kunci: <i>Kepemimpinan;</i> <i>Kepala Sekolah;</i> <i>Tata Kelola;</i> <i>Bantuan Operasional</i> <i>Satuan Pendidikan.</i>	

I. PENDAHULUAN

Kebijakan dana BOSP diawali dari adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2005 yang mengakibatkan pemerintah melakukan pengurangan subsidi BBM. Dalam rangka mengatasi dampak kenaikan harga BBM tersebut, maka pemerintah merealokasikan sebagian besar anggarannya ke empat program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan subsidi langsung tunai (SLT). Salah satu program di bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain. Menurut (Nasser,

2021) bahwa pada prinsipnya program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Dalam pemberian dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat miskin, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikannya. Menurut (Hasbi, 2021) bahwa begitu pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa diharapkan pemberian dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dapat dilaksanakan seadil-adilnya dan tepat pada

sasarannya yaitu siswa-siswi yang berhak atas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yaitu peserta didik yang kurang mampu atau tidak mampu. Pemberian dana operasional sekolah yang tidak tepat sasaran sama saja membuang uang karena hal tersebut dapat menimbulkan penyelewengan. Untuk mencegah hal tersebut, masyarakat harus mengawasi pelaksanaan dan penyaluran BOSP. Dengan melihat tujuan dari pemberian dana BOSP adalah peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun, maka perlu diketahui berapa besar peranan yang ditimbulkan dengan adanya dana BOSP bagi peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri, apakah dengan adanya dana BOSP telah memberi sebuah angin segar bagi peningkatan kualitas pendidikan di dalam negeri ini.

Mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Menurut (Darmawan, 2021) bahwa pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (life skill) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Pada saat ini, jutaan anak usia sekolah di negara kita, dewasa ini masih belum mendapatkan kesempatan bersekolah. Sekitar 1,5 juta di antaranya, anak usia 13-15 tahun, terpaksa putus sekolah. Salah satu solusi pemerintah melalui Kemendiknas, menyalurkan dana bantuan dan kemudahan melalui program BOSP (Bantuan Operasional Sekolah).

Penerima BOSP diutamakan bagi para siswa 3 miskin yang bersekolah swasta. Termasuk membantu siswa putus sekolah, karena tidak mampu membayar iuran/pungutan oleh sekolah. Jika kemudian masih ada sisa dana BOSP, maka akan digunakan mensubsidi siswa lain. Bagi sekolah yang tidak mempunyai siswa miskin, maka dana BOSP digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa sehingga dapat mengurangi pungutan/ sumbangan yang dibebankan kepada orang tua siswa, minimum senilai dana BOSP yang diterima sekolah.

Ada beberapa penyimpangan oleh tim audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP). Beberapa penyimpangan tersebut adalah: a) Penggelumbungan siswa oleh sekolah, b) Beberapa sekolah belum memiliki izin operasional atau masih dalam proses pengurusan izin, namun sekolah itu menerima dana BOSP, c) Masih ditemukan sekolah belum menyetor pajak sesuai dengan ketentuan, d) BPKP juga menemukan sekolah yang belum membebaskan iuran siswa, e) Sekolah belum transparan dalam mengelola BOSP tingkat kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban, karena ditemukannya pengadaan fiktif di beberapa sekolah adanya kecenderungan di beberapa wilayah sumber dana sekolah dari APBD menurun karena adanya BOSP, serta f) Pengguna dana BOSP juga belum sepenuhnya sesuai petunjuk pelaksanaan misalnya digunakan untuk membayar guru PNS/guru kontrak, insentif guru, pengadaan komputer, dipinjamkan dan konsumsi siswa karya wisata. Menurut (Nadeak, 2020) bahwa pengelolaan dana sekolah tampaknya merupakan suatu persoalan baru yang akan dihadapi oleh sekolah seiring dengan dijalankannya Manajemen Berbasis Sekolah dan mampu secara mandiri mengelola sekolah tersebut. BOSP.

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah diberikan kepada semua siswa dari tingkatan SD/MI/SDLB, dari SMP/MTs/SMPLB, Salafiyah setara SMP negeri ataupun swasta. Sedangkan untuk tingkat SMA/SMK/MA, diberikan dana BKM bagi siswa dari kalangan tidak mampu. Sedangkan distribusi diberikan melalui PT. Pos/Bank yang ditransfer ke rekening kepala sekolah sedangkan dana BKM diberikan dalam bentuk tunai kepada pihak sekolah. Pengucuran dana ini terkesan buru-buru yang mengakibatkan sebagian sekolah seperti mendapat "durian runtuh" dan tidak tahu bagaimana harus mengelola dana yang diterimanya. Kebijakan dana BOSP selama ini kurang dapat menekan penyelewengan dalam pengelolaannya. Penyelewengan dana BOSP di tingkat sekolah sepertinya telah menjadi fenomena. Salah satu sebabnya adalah rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

Menurut (Supriani, 2022) bahwa dalam menyikapi kebijakan desentralisasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah yang bergulir bersamaan dengan era globalisasi sekarang ini, yang ditandai dengan kompetensi global yang sangat ketat dan tajam, perlu dilakukan per-

bahan paradigm kepemimpinan pendidikan, terutama dalam pola hubungan atasan-bawahan yang bersifat hierarkis-komando, seringkali menempatkan bawahan sebagai objek. Pemaksaan kehendak dan pragmatis merupakan sikap dan juga perilaku yang kerap mewarnai kepemimpinan komando-berokratik-hierarkis, yang pada akhirnya berakibat fatal terhadap terbelenggunya sikap inovatif dan kreatif dari setiap bawahan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, mereka cenderung bersikap apriori dan bertindak hanya atas dasar perintah sang pemimpin semata. Dengan kondisi demikian, pada akhirnya akan sulit dicapai kinerja yang unggul dan produktif.

Model kepemimpinan menurut (Mulyasa, 2013) dalam bukunya *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah* diharapkan dapat mendorong seluruh bawahan dan warga sekolah dapat memberdayakan dirinya, dan membentuk rasa tanggungjawab atas tugas yang diembannya, kepatuhan tidak lagi didasarkan pada control eksternal organisasi, namun justru berkembang dari hati sanubari yang disertai dengan pertimbangan rasionalnya. Terry dalam (Tanjung, 2022) mengemukakan bahwa untuk dapat memberdayakan setiap individu dalam tingkat persekolahan, seorang kepala sekolah seyogyanya dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemberdayaan, memperlihatkan idealisme pemberdayaan, penghargaan terhadap segala usaha pemberdayaan dan penghargaan terhadap segala keberhasilan pemberdayaan. Menurut Nawawi dalam (Hanafiah, 2022) bahwa kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerja sama menuju kepada suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama..

Dari beberapa definisi mengenai kepemimpinan maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam memimpin dan juga mempengaruhi bawahannya agar dapat bekerja dengan baik sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan. Bagi seorang kepala sekolah di era desentralisasi sekarang mengetahui tiga jenis kepemimpinan yang dianggap representative untuk diterapkan, yaitu kepemimpinan transaksional, transformasional, dan visioner. Kebijakan Pemerintah Yang Berkaitan Dengan BOSP yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, dalam peraturan tersebut dijelaskan

bahwa Pengelolaan Dana BOSP dilakukan berdasarkan prinsip: a) fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana, b) efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan; c) efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal; d) akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e) transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Berdasarkan hasil verifikasi ke sejumlah satuan pendidikan dari bulan Februari s.d April 2023 maka diperoleh data bahwa sebagian Kepala Sekolah belum memahami tentang tata Kelola BOSP yang sesuai dengan rapor pendidikan. Hal ini berdampak pada objek belanja yang dikeluarkan tidak mengacu pada perencanaan pendidikan. Sehingga tidak adanya kesesuaian program pendidikan dengan keluaran yang dihasilkan. Oleh karena itu peneliti ingin membahas tentang Bagaimana Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Tata Kelola BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Tata Kelola BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa metode deskriptif analisis. Menurut (Arifudin, 2023) bahwa deskriptif analisis adalah penelaahan secara empiris yang menyelidiki suatu gejala atau fenomena khusus dalam latar kehidupan nyata. Hasil penelitian ini dikumpulkan dengan data primer dan data skunder. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Tanjung, 2023) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Arifudin, 2022) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian

pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Hanafiah, 2021). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan juga merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Arifudin, 2020). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Tata Kelola BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

2. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Ulfah, 2022).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (Ulfah, 2019). Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Supriani, 2023) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Tata Kelola BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) di Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat. Menurut Muhadjir dalam (Mayasari, 2022) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan

dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini akan dibahas tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah, dan Tata Kelola BOSP.

1. Kepemimpinan Kepala Sekolah

Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat baik dalam pembiayaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana (Arifudin, 2021). Bentuk keseriusan pemerintah terhadap pembiayaan Pendidikan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Bagi seorang kepala sekolah di era desentralisasi sekarang mengetahui tiga jenis kepemimpinan yang dianggap representative untuk diterapkan, yaitu kepemimpinan transaksional, transformasional, dan visioner.

a) Kepemimpinan Transaksional

Kepemimpinan yang menekankan pada tugas yang diemban bawahan. Lebih difokuskan juga pada peranannya sebagai manajer karena ia sangat terlibat dalam aspek-aspek prosedural manajerial yang metodologis dan fisik. Tidak mengembangkan pola hubungan laissez fair atau membiarkan personel menentukan sendiri pekerjaannya karena akan dikhawatirkan dengan keadaan personel yang perlu pembinaan, pola ini.

b) Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan Transformasional juga didasarkan pada kebutuhan akan penghargaan diri, tetapi menumbuhkan kesadaran pada pemimpin untuk berbuat yang terbaik sesuai dengan kajian perkembangan manajemen dan kepemimpinan yang memandang manusia, kinerja, dan pertumbuhan sebagai sisi yang saling berpengaruh. Burn dalam (VF Musyadad, 2022) menyatakan bahwa pada kepemimpinan ini, "para pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Peranan Kepemimpinan Transformasional untuk memberikan nuansa perubahan ke tingkat yang lebih baik berbeda dari sebelumnya.

c) Kepemimpinan Visioner

Kepemimpinan visioner merupakan kemampuan pemimpin dalam menjabarkan dan menerjemahkan visi dalam tindakan. Visi merupakan peluru bagi kepemimpinan visioner. Visi berperan dalam menentukan masa depan organisasi apabila diimplementasikan secara komprehensif. Peranan Kepemimpinan Visioner yaitu untuk dapat memotivasi karyawan atau Guru untuk bertindak dengan arah yang telah ditentukan.

Dari penjelasan di atas terkait keterampilan kepemimpinan kepala sekolah penulis menyimpulkan. Bahwa pemimpin mempunyai peranan sebagai subyek yang aktif, kreatif dalam menggerakkan orang baik sebagai individu maupun kelompok/organisasi dalam pencapaian tujuan/visi, secara efektif. Kepemimpinan kepala sekolah memiliki peran strategis dalam kerangka manajemen dan kepala sekolah merupakan salah satu faktor terpenting dalam menunjang keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Menurut (Apiyani, 2022) bahwa Kepala sekolah adalah pengelola satuan pendidikan yang bertugas menghimpun, memanfaatkan, mengoptimalkan seluruh potensi dan SDM, sumber daya lingkungan (sarana dan prasarana) serta sumber dana yang ada untuk membina sekolah dan masyarakat sekolah yang dikelolanya. Kepala sekolah yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peran kepala sekolah sebagai seorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah.

2. Tata Kelola BOSP

Pada umumnya para Kepala Sekolah Dasar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pengelola dana BOS mengeluh dan merasa kewalahan dalam mengelola dana BOS. Hal ini dipicu begitu banyaknya kegiatan yang akan dan harus dilaksanakan sekolah dalam rangka memenuhi standar minimal Pendidikan yang diselenggarakan sekolah (Tanjung, 2021). Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan. Ruang melalui kebijakan Dana BOS TA 2023 Pelaporan tiap tahapan menjadi syarat penyaluran: 1. Laporan

keseluruhan TA 2022 menjadi syarat penyaluran tahap I TA 2023 (sudah review APIP untuk satuan pendidikan negeri) 2. Laporan tahap I menjadi syarat penyaluran tahap II TA 2023 dan minimal telah merealisasikan paling sedikit 50% dari dana yang diterima pada tahap I. Hanya satu kanal laporan, yaitu aplikasi RKAS yang disediakan oleh Kemendikbudristek Penyampaian laporan diatur batas waktunya: Laporan Tahap I 31 Juli 2023 Laporan Keseluruhan 31 Januari 2024 Strategi & Peran Dinas Pendidikan & Satuan Pendidikan dalam Percepatan Penyaluran Tahap 1. Peranan Satuan Pendidikan:

- Menyelesaikan keseluruhan pelaporan dana BOSP TA 2022,
- Mengajukan pengesahan BKU sampai dengan bulan desember di ARKAS untuk penerima BOS,
- Mengajukan konfirmasi sisa dana di BOP Salur untuk penerima BOP.

Peranan Dinas Pendidikan dalam Tata Kelola BOS, yaitu:

- Melakukan rekonsiliasi sisa Dana BOS Reguler TA 2022 dengan APIP Daerah,
- Mengecek pelaporan sekolah dan mengesahkan BKU sampai bulan Desember,
- Melakukan konfirmasi sisa dana di aplikasi BOP Salur (bagi penerima BOP TA 2022) atau block sync di MARKAS (bagi penerima BOP TA 2022) 4. ceklis menu reuiu APIP pada MARKAS untuk satuan pendidikan negeri yang sudah selesai proses review/verifikasi pelaporan dan sisa dana
- Tahapan Penyaluran BOSP TA 2023 Tahap 1.

Berdasarkan hal ini menurut (Sulaeman, 2022) bahwa semua keputusan yang diambil haruslah menomorsatukan murid dan pembelajarannya. Satuan Pendidikan juga harus menciptakan Lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan dan juga inklusif, mengembangkan budaya refleksi dalam setiap aspek pengelolaannya, baik dalam hal pengajaran dan pembelajaran, maupun dalam hal administratif, seperti perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Budaya refleksi ini dimaksudkan bahwa semua anggota komunitas dalam satuan pendidikan gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi dengan tujuan untuk layanan yang semakin baik untuk murid-murid di satuan pendidikannya. Hasil belajar murid pada satuan pendidikan terus mengalami peningkatan. Peningkatan hasil

belajar murid terutama dalam kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi dan juga karakter.

Komponen-komponen pembiayaan BOS pada Pendidikan Dasar meliputi 11 komponen, yaitu: (1) Pengembangan perpustakaan. (2) Penerimaan Peserta Didik Baru. (3) Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. (4) Kegiatan evaluasi pembelajaran (Yuliani, 2016). (5) Pengelolaan Pembiayaan Sekolah (Malik, 2014). (6) Pengembangan profesi Guru. (7) Langganan daya dan jasa. (8) Pemeliharaan dan juga perawatan Sekolah (Hidayat, Burhan, & Al Ma'ruf, 2019). (9) Gaji honorarium bulanan. (10) Pembelian dan perawatan alat multi media pembelajaran. (11) Biaya lainnya jika seluruh komponen terpenuhi (Silele & Sabijono, 2017).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemimpin mempunyai peranan sebagai subyek yang aktif, kreatif dalam menggerakkan orang baik sebagai individu maupun kelompok/organisasi dalam pencapaian tujuan/visi, secara efektif. Kepemimpinan kepala sekolah memiliki peran strategis dalam kerangka manajemen dan kepala sekolah merupakan salah satu faktor terpenting dalam menunjang keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Kepala sekolah adalah pengelola satuan pendidikan yang bertugas menghimpun, memanfaatkan, mengoptimalkan seluruh potensi dan SDM, sumber daya lingkungan (sarana dan prasarana) serta sumber dana yang ada untuk membina sekolah dan juga masyarakat sekolah yang dikelolanya. Kepala sekolah yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peran kepala sekolah sebagai seorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah.

B. Saran

Berdasarkan kajian di atas, bahwa ada beberapa saran yang bisa diberikan berdasarkan dari hasil penelitian ini yakni Satuan Pendidikan harus menciptakan Lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan dan inklusif, mengembangkan budaya refleksi dalam setiap aspek pengelolaannya, baik dalam hal pengajaran dan pembelajaran,

maupun dalam hal administratif, seperti perencanaan, monitoring, dan juga evaluasi. Budaya refleksi ini dimaksudkan bahwa semua anggota komunitas dalam satuan pendidikan gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi dengan tujuan untuk layanan yang semakin baik untuk murid-murid di satuan pendidikannya. Hasil belajar murid pada satuan pendidikan terus mengalami peningkatan. Peningkatan hasil belajar murid terutama dalam kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi dan karakter

DAFTAR RUJUKAN

- Apiyani, A. (2022). Implementasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru Madrasah Dalam Meningkatkan Keprofesian. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2), 499–504.
- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50–58.
- Arifudin, O. (2022). Optimalisasi Kegiatan Ekstrakurikuler dalam Membina Karakter Peserta Didik. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 829–837.
- Arifudin, O. (2021). Implementasi Balanced Scorecard dalam Mewujudkan Pendidikan Tinggi World Class. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 767–775.
- Arifudin, O. (2020). Peranan Konseling Dosen Wali Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 10(2), 237–242.
- Darmawan, I. P. A. (2021). *Total Quality Management Dalam Dunia Pendidikan" Model, Teknik Dan Impementasi"*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Hanafiah, H. (2022). Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru melalui Supervisi Klinis Kepala Sekolah. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(10), 4524–4529.
- Hanafiah, H. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas

- Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(2), 213-220.
- Hasbi, I. (2021). *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori Dan Praktik)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Hidayat, R., Burhan, M. R., & Al Ma'ruf, A. M. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan (Studi Di SDN 44 Mande Kota Bima). *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*. 3 (1), 23-31.
- Malik. (2014). Sistem Informasi Pengelolaan Dan Laporan Keuangan Dana BOS Berbasis Multi User Di Mts Sudirman Jimbaran. *Jurnal Mahasiswa STEKOM Semarang*. 1 (2), 32-41.
- Mayasari, A. (2022). Implementasi Model Problem Based Learning (PBL) Dalam Meningkatkan Keaktifan Pembelajaran. *Jurnal Tahsinia*, 3(2), 167-175.
- Mulyasa. (2013). *Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nadeak, B. (2020). *Manajemen Humas Pada Lembaga Pendidikan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Nasser, A. A. (2021). Sistem Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web Dalam Meningkatkan Mutu Siswa Di Era Pandemi. *Biormatika: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 7(1), 100-109.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
- Silele, E., & Sabijono, H. (2017). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada SD Inpres 4 Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. 2 (1), 52-41.
- Sulaeman, D. (2022). Implementasi Media Peraga dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 71-77.
- Supriani, Y. (2023). Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Plamboyan Edu*, 1(1), 95-105.
- Supriani, Y. (2022). Peran Manajemen Kepemimpinan dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 332-338.
- Tanjung, R. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Menulis Jurnal Ilmiah. *Jurnal Karya Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM)*, 1(1), 42-52.
- Tanjung, R. (2022). Manajemen Mutu Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 6(1), 29-36.
- Tanjung, R. (2021). Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Sekolah Dasar. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(4), 291-296.
- Ulfah, U. (2022). Kepemimpinan Pendidikan di Era Disrupsi. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 153-161.
- Ulfah, U. (2019). Peran Konselor Dalam Mengembangkan Potensi Peserta Didik. *Jurnal Tahsinia*, 1(1), 92-100.
- VF Musyadad. (2022). Supervisi Akademik untuk Meningkatkan Motivasi Kerja Guru dalam Membuat Perangkat Pembelajaran. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(6), 1936-1941.
- Yuliani, H. (2016). Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Ngrojo. *Jurnal Hanata Widya*. 1 (1), 1-10.